

**manajemen perkotaan dan
tata guna lahan:**

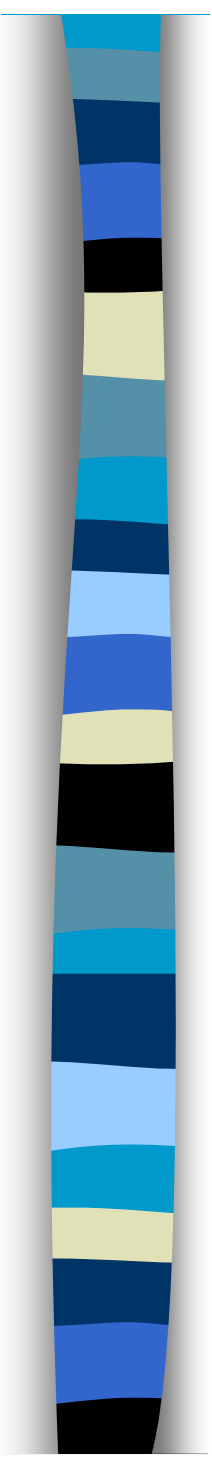
*pengantar ke
masalah, konsep, dan strategi*

Plate 3 Jakarta from the air: it is not urbanisation itself which is the problem, but the ability or otherwise of governments to cope with it, in terms of ensuring access for all to land, shelter and essential services.



Definisi dan Terminologi

- Manajemen Perkotaan merupakan istilah yang diterjemahkan dari *Urban Management* yang merupakan salah satu program dari UNHCS (United Center for Human Settlements), sebuah organisasi PBB yang mengkaji masalah perkotaan dan permukiman
- Istilah ini relatif baru, mulai muncul dalam report UNHCS sekitar tahun 1960-an.

- 
- Mnaj. Perkotaan adalah suatu upaya mobilisasi sumber daya perkotaan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian, secara efisien dan efektif guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari suatu kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan lingkungan strategis.



Kebijakan Manaj. Perkotaan mencakup:

- Tata ruang
- Pemanfaatan lahan
- Program investasi
- Pembiayaan pembangunan
- Lingkungan hidup
- Kelembagaan
- Partisipasi masyarakat
- Pelayanan masyarakat



Prinsip dasar Manaj. Perkotaan:

- Peran serta setiap warga negara
- Penegakan hukum
- Transparansi dan keterbukaan informasi
- Ketanggapan (peka) keadilan bagi setiap orang
- Efektifitas dan efisiensi
- Memiliki visi
- keterjangkauan



Pendekatan dalam Manaj.Perkotaan

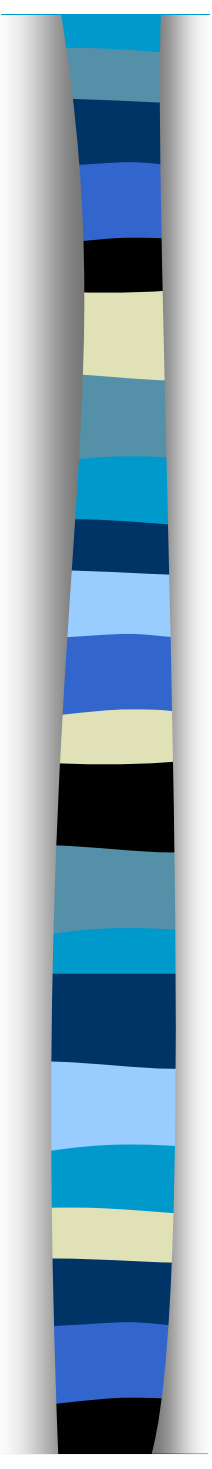
Lea dan Courtney:

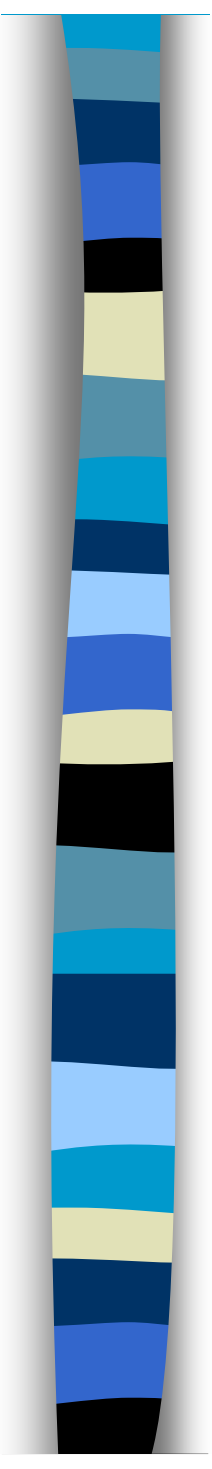
- Pendekatan **problem-oriented teknokratis**, fokus pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada dalam memecahkan masalah perkotaan
- Pendekatan **ekonomi-politik-struktural**, fokus pada akar permasalahan perkotaan dalam konteks struktur ekonomi politik nasional dan internasional

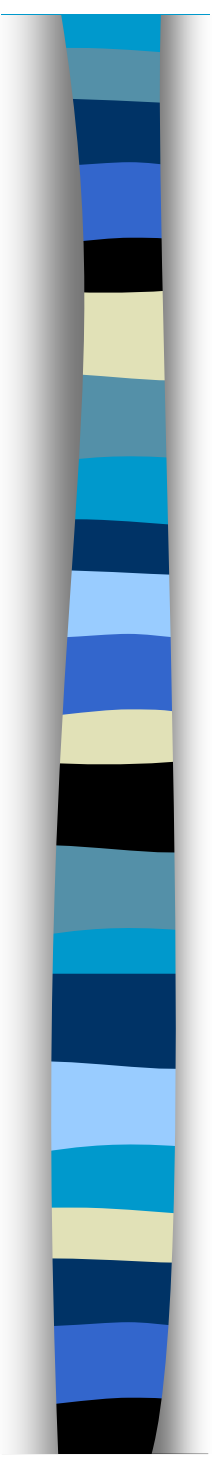


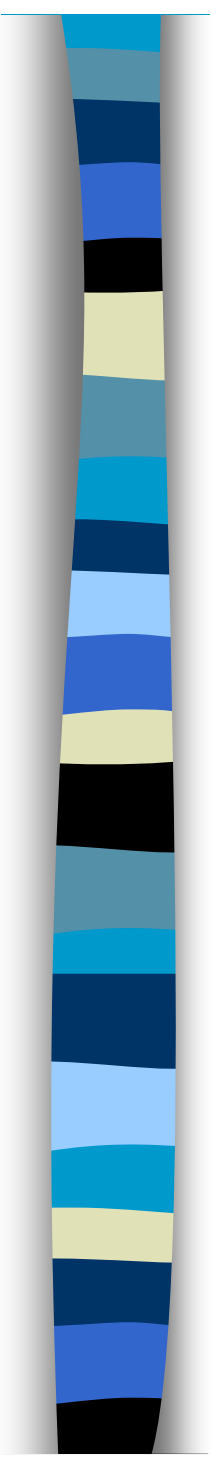
M Syafier, kemudian oleh Devas dan Rakodi:

- Pendekatan **improving hand** yaitu kombinasi antara kekuatan pasar bebas dan kontrol negara.
- Dalam improving hand pemerintah memainkan peran yang proaktif terutama bila kecenderungan pasar akan menyebabkan kerugian pada masyarakat miskin dan marjinal lainnya.

- 
- Remy Proud'homme
 - Koordinasi internal: koordinasi yang dijalin antara sektor pemerintah dan sektor swasta guna memacu pertumbuhan kota.
Mis. Public-private partnership, mekanisme informal kemasyarakatan (semangat gotong royong, RT/RW, dll), kolaborasi politisi dan kaum profesi, antar sektor/departemen terkait dengan swasta.

- 
- Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar tingkat pemerintahmis. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Instrumen yang lazim digunakan adalah subsidi, mandat, juklak, juknis, azas pembantuan, dsb.

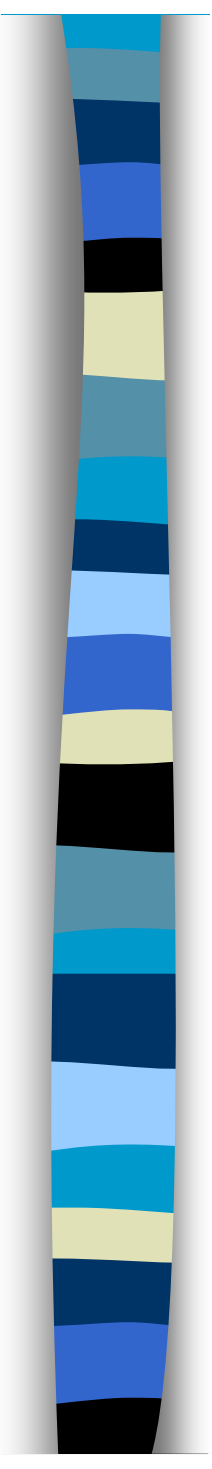
- 
- Koordinasi horizontal, mengacu pada koordinasi antar lembaga umum dan lembaga khusus. Lembaga umum menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat politis seperti koordinasi, keamanan, ketertiban, pembinaan masyarakat. Lembaga khusus menjalankan tugas-tugas teknis seperti pembuatan gorong-gorong kota, pengelolaan sampah, air, listrik, telpon, dll.



Gagasan yang mempengaruhi perkembangan pendekatan Manaj Perkotaan tersebut:

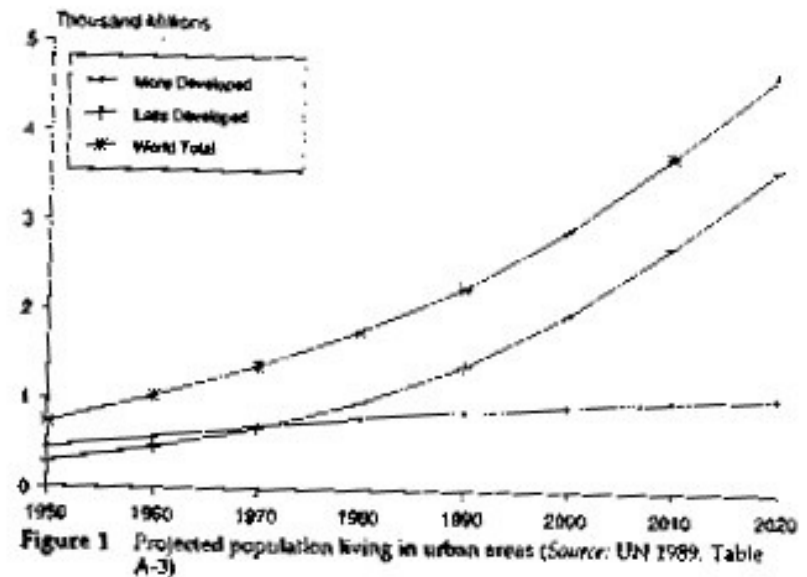
- Concern terhadap pembangunan lokal dan nasional.

Dulu kota dianggap parasit bagi perkembangan ekonomi, sampah bagi lahan pertanian, surga bagi pengangguran, beban bagi sara prasarana akibat membludaknya urbanisasi. Sekarang kota adalah “the engine of economic growth”

- 
- Sektor informal. Awalnya dianggap ilegal, berbahaya bagi bisnis “legal”, tidak baik bagi kesehatan, dsb. Sekarang sektor informal diyakini memberi sumbangan besar bagi ekonomi kota dan melarangnya adalah ibarat “killing the goose that laying the golden eggs”.
 - Dominansi permukiman
 - Akses kepada ketersediaan lahan sebagai isu utama
 - Pembangunan dan perkembangan infra struktur
 - Concern terhadap kaum miskin dan komunitas
 - Perkembangan mekanisme pasar dan sektor swsta
 - Peningkatan kesadaran lingkungan hidup

Permasalahan dalam Manajemen Perkotaan dan Tata Guna Lahan

- **growth rate of urban population**
 - di negara maju hanya sekitar 1%
 - - di negara berkembang 3,7 %
 - - banyak negara terutama di Afrika memiliki tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 7% per tahun



proportion of population

THE URBAN CHALLENGE

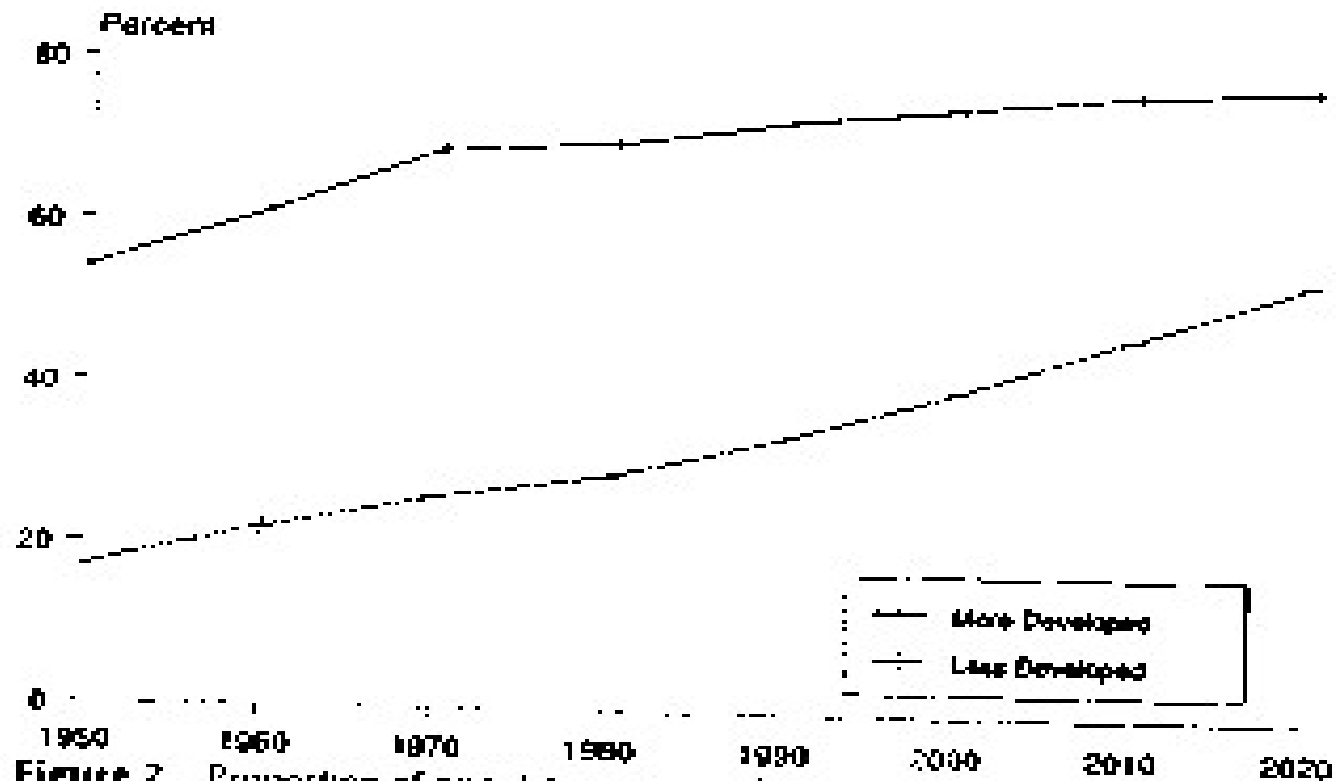


Figure 2 Proportion of population expected to be living in urban areas
(Source: UN 1989; Table A.1)



proportion of population living in urban areas

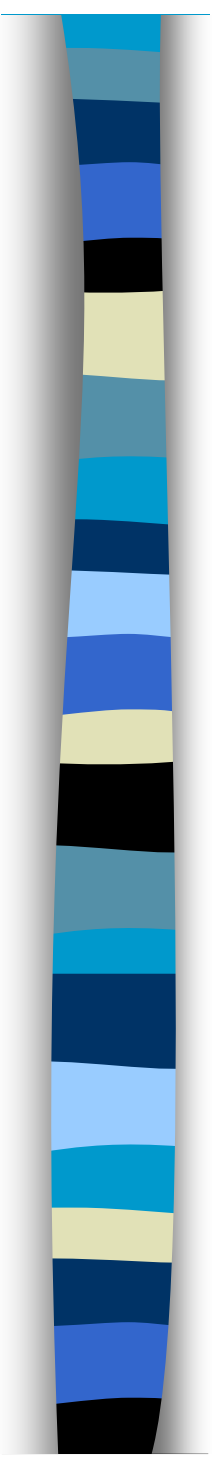
- - di negara berkembang 34 % tinggal di kota
- - di negara maju (Belgia, UK, Hongkong, Singapura) 90% tinggal di kota
- - di Nepal dan Afrika (Uganda, Rwanda, Burundi) hanya sekitar 10% yang tinggal di kota

tujuh dari 10 kota paling banyak penduduknya di dunia terdapat di negara berkembang: Mexico City, Sao Paulo, Calcutta, Greater Bombay, Lagos, Delhi, dan Jakarta.

Table 1.4 Countries with the greatest absolute increase in urban population, 1970-1985

	Urban Population		1970-85 absolute increase (millions)	1970-85 per cent increase	Population projection	
	1970 (millions)	1985			2000 (millions)	increase
India	109.6	196.2	86.6	79%	356.9	160.7
China	167.0	218.6	51.6	31%	322.1	103.5
Brazil	53.5	98.6	45.1	84%	148.4	49.8
Mexico	31.1	55.3	24.2	78%	82.9	27.6
Indonesia	20.5	42.2	21.7	106%	76.0	33.8
Nigeria	11.4	29.6	18.2	160%	68.9	39.3
Pakistan	16.4	30.8	14.4	88%	61.4	20.6
South Korea	13.0	26.8	13.8	106%	38.7	11.9
Iran	11.6	24.7	13.1	113%	45.5	20.8
Philippines	12.4	21.8	9.4	76%	36.0	16.2
Egypt	14.0	22.1	8.1	58%	36.5	14.4
Colombia	11.9	19.4	7.5	63%	29.6	9.2
Venezuela	7.7	15.2	7.5	97%	23.2	8.0
Bangladesh	5.1	12.0	6.9	135%	27.4	15.4
South Africa	10.8	17.7	6.9	64%	28.1	10.4
Argentina	18.8	25.6	6.8	36%	32.2	6.6
North Korea	7.0	13.0	6.0	86%	20.5	7.5
Iraq	5.3	11.2	5.9	111%	20.9	9.7
Turkey	13.6	19.5	5.9	43%	36.2	16.7
Peru	7.6	13.3	5.7	75%	21.0	7.7
Saudi Arabia	2.8	8.5	5.7	204%	16.9	6.4
Thailand	4.8	10.2	5.4	113%	18.7	8.5

Source: UNFPA, Table A-1



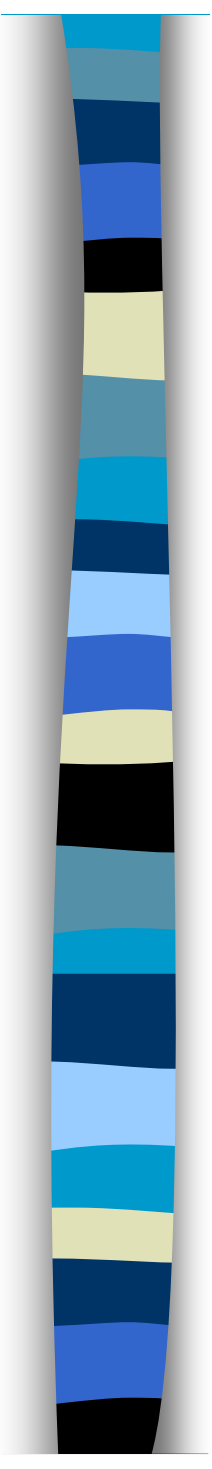
Implikasi dari “exploding cities” tersebut adalah kekurangan pada infra struktur dan pelayanan publik (urban service) seperti:

1. Urban poverty
2. persediaan air bersih
3. sistem sanitasi
4. perumahan
5. sistem transportasi



Poverty

When UNDP first came to **Indonesia**, it was one of the world's poorest countries. In the early 1970s, some 70 million Indonesians, or 60% of the population, lived in absolute poverty. In line with national priorities, UNDP focused on helping to improve the agriculture, forestry and fisheries sectors. This was combined with rural development activities in health, family planning and education. The Government launched an impressive attack on illiteracy, infant mortality and public health issues.



Following the oil boom of the late 1970s and early 1980s, UNDP supported the Government's programme of promoting non-oil exports by assisting the development of small- and medium-scale industries.. The country began to achieve average annual growth of almost 7%, a performance rivaling that of its Asian neighbours.

By 1996, the poverty rate had fallen to 11.8% of the total population. However, **Indonesia** was hit particularly hard by the Asian economic crisis in 1997. The crisis had significant social costs, including rising unemployment, rapid escalation of food prices, and deterioration in public services. Poverty rose from 11.8% in 1996 to 23.5% in 1998/9.

The economic crisis was accompanied by severe drought that caused food shortages in many provinces, and by widespread forest fires in parts of Kalimantan and Sumatra that destroyed nearly ten million hectares of forest and devastated local livelihoods.



Why do cities continue to grow?

Population growth

1. urbanisasi atau *in-migration*
2. natural growth

sebagai contoh di Philipina in-m ratelya 1,8% per tahun tetapi total pg nya mencapai 3,9%. Indonesia 2,7% dan 5%, Kenya 4,6% dan 8,5%, Korsel 2,9% dan 5,3%. Data ini menunjukkan bahwa *natural growth* disamping *in-migration menjadi* faktor yang sangat menentukan pertumbuhan kota. Tanpa *in-migration* pun, kota kan terus tumbuh akibat *natural growth* nya.

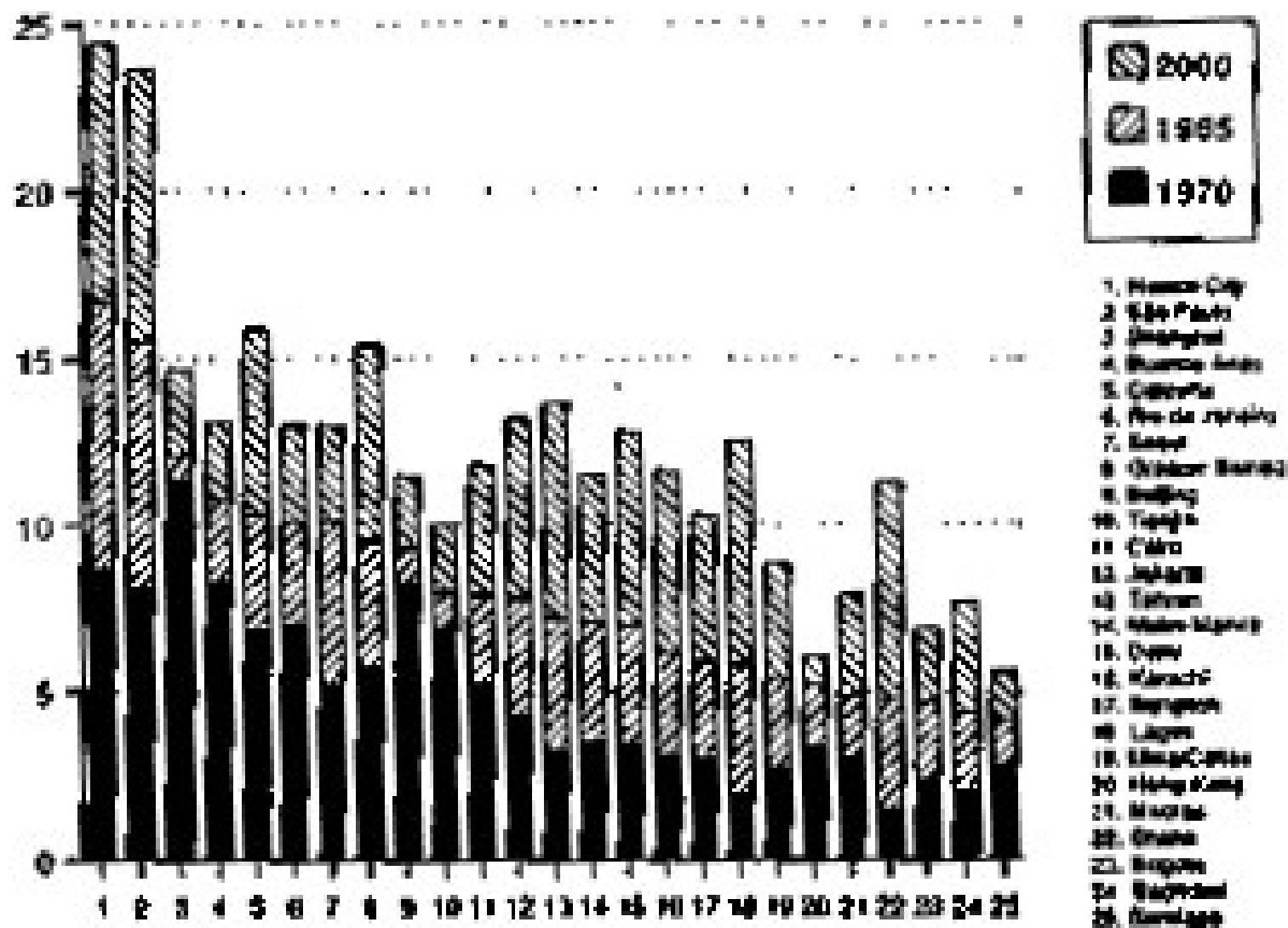


Figure 5 1970, 1985 and projected 2000 population of the largest cities of the developing world (Source: UN 1989: Table 6)



Can urban growth be controlled?

- Afrika Selatan 1970-1985: a strict policy of controlling the movement of the black population (racial superiority).
- Jakarta, Indonesia, 1970 an: residence permits
- Kamboja (Regim Khmer): 1970 –1980 jumlah populasi menurun dari 800 000 menjadi 650 000 dengan politik *rustication* (not to mention *genocide*).
- China: strict control over family size, emphasis on development on rural areas thru investment in agriculture, control where epeople live (housing and food supply), rustication of student, intellectuals and other politically suspect groups.

Huge political and social cost



Atau:

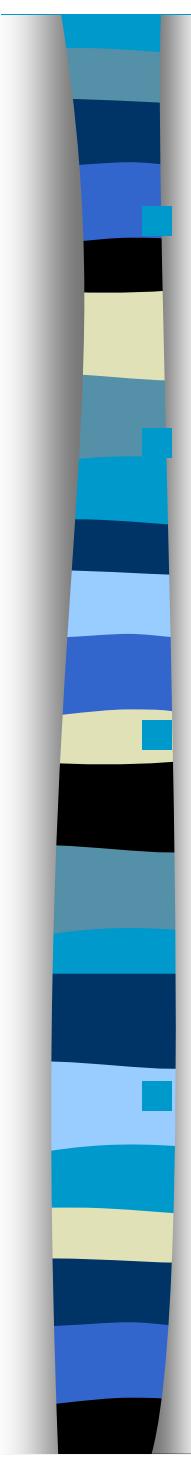
- Improvement standard of living of the rural population: investasi isang pertnian, peningkatan daya jual, rural land reform, akses kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningktan sara transportasi di pedesaan, dll
- Mengontrol lokasi industri, pinjam untuk investor yang hendak membangun desa, subsidi employments, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, land re-adjustment, dll

The investment costs are huge



Urban Planning & Management: the new realism

1. Kesadaran terhadap pertumbuhan populasi, bahwa kota tidak mungkin dibatasi secara ketat melainkan diakomodasi dan direncanakan.
2. Kesadaran bahwa kota terbentuk terutama karena keputusan yang diambil oleh orang per orang dan organisasi dan bukan hanya oleh pemerintah. Dan bahwa sektor swasta memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan kota.
3. Kesadaran terhadap perlunya pemerintah membatasi diri dalam mekanisme pasar karena campur tangan yang tidak relevan sering kali memperburuk keadaan.
4. Kesadaran terhadap sumber daya/kemampuan kota yang terbatas.



5. Kesadaran terhadap kehadiran “people” atau masyarakat terutama kemampuan kalangan miskin dalam penyediaan rumah.

6. Kesadaran bahwa proses perencanaan bukanlah proses linear dan kaku tetapi luwes, fleksibel, dan realistis dan memungkinkan monitoring dan feedback.

7. Kesadaran terhadap keterbatasan kapasitas institusi dalam mengimplementasikan rencana dan program dalam hal kemampuan teknis, kapasitas manajemen, konflik korupsi, kelemahan birokrasi, dsb.

8. Kesadaran terhadap kehidupan politik dan agenda politik di masa datang yang mempengaruhi implementasi rencana.

Kasus-kasus

